

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan upah buruh merupakan topik penting dibahas karena upah adalah komponen utama bagi buruh dalam menopang kehidupan mereka sehari-hari. Upah menurut pasal 1 butir 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa atau telah atau akan dilakukan.

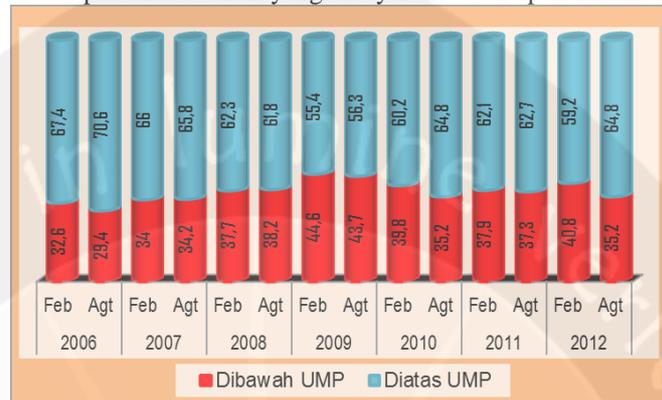
Dalam pelaksanaannya, penentuan besaran jumlah upah di Indonesia biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pihak perusahaan. Namun untuk melindungi pekerja/buruh terhadap ketidak-adilan upah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 88 ayat 2 dan pasal 89 ayat 1 yang mengatur tentang kebijakan upah minimum. Tujuan ditetapkannya upah minimum tersebut sebagai jaring pengaman (*safety net*), sehingga tingkat upah tidak lebih rendah dari ketetapan.¹

Artinya meski besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pihak pengusaha tidak boleh membayarkan upah yang lebih rendah dari besaran upah minimum yang ditetapkan. Faktanya masih terdapat beberapa perusahaan di

¹ Kelana, Yatim, dkk. 1993. Sorotan Pers tentang Ketenagakerjaan 1988-1993. PT Saro Media. Hal 202-203.

Indonesia yang membayar upah lebih rendah dari besaran upah minimum yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.1
Tabel persentase buruh yang dibayar dibawah upah minimum



Sumber: Publikasi ILO (International Labour Organization) yang diakses melalui pada 26 September 2014 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_210427.pdf

Terkait penentuan jumlah besaran upah minimum ini, peneliti mengamati terdapat konflik kontroversial antara buruh dan pengusaha disejumlah pemberitaan di media massa. Pihak pengusaha diwakili oleh Asosiasi Pengusaha (Apindo) dan buruh diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pihak pengusaha kerap kali keberatan akan besaran jumlah upah minimum yang ditetapkan. Hariyadi Sukamdi, Ketua Apindo bidang Pengupahan, misalnya menilai pola penentuan upah minimum semakin keluar dari koridor karena hasil yang diputuskan oleh pemerintah daerah tidak realistis. Misalnya, dalam penetapan UMP DKI Jakarta 2013 sebesar Rp2,2 juta dinilai contoh kebijakan yang mengedepankan popularitas pengambil kebijakan, tanpa mempertimbangkan keberlangsungan usaha.²

² Kepopularitasan ini berkaitan dengan Joko Widodo yang baru saja terpilih menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Lihat *SKH Bisnis Indonesia*, edisi 22 November 2012.

Sofjan Wanandi, Ketua Apindo menyatakan beberapa pengusaha berencana merelokasi pabrik ke negara lain karena tidak sanggup membayar upah yang semakin tinggi. Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan (API) menuturkan putusan pemerintah yang menaikkan upah terlalu tinggi menyebabkan investor tidak percaya kepada pemerintah yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Sementara itu, Suryadi Sasmitam Wakil Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI) mengatakan dampak kenaikan upah tersebut bahkan akan *me-rumah-kan* separuh *Sales Promotion Girls* (SPG).³ Dalam siaran persnya, pihak pengusaha juga mengaku siap menempuh jalur hukum untuk mendebatkan besaran upah minimum.⁴

Menariknya, masalah kenaikan upah buruh lebih sering dikeluhkan pengusaha daripada membongkar penyebab ekonomi tinggi, seperti biaya siluman (*Invisible cost*). Biaya siluman misalnya biaya-biaya pungutan liar yang harus dibayarkan pengusaha dalam memperoleh izin usaha, produksi, dan lain sebagainya. Padahal upah buruh Indonesia hanya sekitar lima persen dari total biaya produksi sementara biaya siluman itu bisa mencapai 40 persen.⁵

Di sisi lain, pihak buruh/pekerja tidak pernah merasa mendapatkan upah layak. Hal ini dikarenakan ketidak-mampuan buruh dalam mencukupi kehidupan sehari-hari yang semakin bertambah dan harga kebutuhan yang terus menaik. Presiden Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Mudkofir, mengatakan sikap

³ *SKH Kompas*, edisi 3 November 2012.

⁴ Hal ini terkait dengan ketidaksetujuan pengusaha atas besaran Upah minimum Provinsi DKI sebesar Rp 2.216.243. Lihat *SKH bisnis Indonesia*, edisi 14 november 2012.

⁵ Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi: manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 177.

penolakan kenaikan upah minimum di provinsi, kabupaten dan kota merupakan suatu upaya menjalankan upah murah tapi ingin produktivitas yang tinggi.

Akibatnya, buruh turun ke jalan menuntut kenaikan upah. Buruh menuntut kesejahteraan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu terhadap aksi unjuk rasa buruh. Hal ini misalnya, Kurnelius Budi Kuncoro dalam rubrik “*Pembaca Menulis*” *SKH Bisnis Indonesia* mengharapkan aksi unjuk rasa buruh yang akan diadakan pada tanggal 12 Juli 2012 tidak mengganggu ketertiban seperti aksi unjuk rasa sebelumnya dengan memblokir Jalan Tol Bekasi dan di Pertamina yang menyebabkan kemacetan parah dan panjang di Pantura Indramayu.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelindung dinilai juga tidak pernah tegas dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan terutama soal pengupahan. Berbagai peraturan yang dikeluarkan atau Undang-undang ketenagakerjaan juga belum memihak kepentingan buruh. Misalnya, melalui Inpres No 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, Presiden secara langsung ikut campur dalam penetapan upah minimum.⁶

⁶ Padahal berdasarkan Pasal 89 UU Ketenagakerjaan, Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur. Dalam Inpres ini, pemerintah mencarut marutkan konsep upah minimum, yang berdasarkan UU Ketenagakerjaan dapat berupa upah minimum provinsi/kabupaten/kota dan upah minimum sektor pada provinsi/kota, menjadi “untuk daerah yang upah minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan upah minimum dibedakan antara industri padat karya tertentu dengan industri lainnya” yang secara nyata dapat diartikan bahwa upah minimum provinsi/kabupaten/kota dikesampingkan dan hanya ada upah minimum sektoral. Selanjutnya dengan adanya Inpres tersebut, Presiden telah mem-privatkan penetapan UMP/K yang sudah mencapai KHL dengan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja. Hal ini mustahil terjadi, mengingat relasi kuasa antara pengusaha dan pekerja sudah timpang. Secara langsung Presiden melarang kenaikan UMP/K jika besarnya sudah sesuai dengan KHL. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan, kenaikan UMP/K ditetapkan oleh Gubernur, bukan melalui perundingan/bipartit pekerja-pemberi kerja. Lihat <http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2014/05/Kertas-Posisi-May-Day-2014-LBH-Jakarta.pdf> diakses pada 26 Mei 2014

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk menelisik lebih jauh bagaimana polemik kenaikan upah minimum ini dibangun dan pada akhirnya menjadi sebuah wacana dominan di media massa. Melalui analisis wacana kita tidak hanya mengetahui bagaimana teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frasa, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. Melalui wacana, individu bukan hanya didefenisikan tetapi juga dibentuk, dikontrol dan didisplinkan.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana van Dijk yang menekankan pada kognisi sosial sebagai pisau analisis. Analisis kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental wartawan. Pendekatan kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, karena makna sesungguhnya diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Berita dalam hal ini dipandang dari representasi wartawan. Pandangan, kepercayaan, stereotipe, dan kepercayaan wartawan mempengaruhi bagaimana teks berita yang dihasilkan.

Media yang digunakan ialah *SKH Bisnis Indonesia*. Hal ini dikarenakan sebagai koran pertama bersegmentasi ekonomi, *SKH Bisnis Indonesia* sendiri diterbitkan dari golongan pengusaha terkemuka di Indonesia yang berperan aktif dalam aktivitas perekonomian Indonesia. *SKH Bisnis Indonesia* di mata para

⁷ Eriyanto. 2001. Analisis wacana: Pengantar analisis Teks Media .Yogyakarta: Lkis. Hal xv.

pelaku bisnis, birokrat, ekonom, akademisi dan segmen pembaca lainnya diterima sebagai penyaji informasi akurat dan terpercaya (data superbrand 2007). Dengan membangun *trust* dan komitmen untuk memberikan informasi yang layak dipercaya, *SKH Bisnis Indonesia* telah menjadi pemimpin pasar (*market leader*) dalam pemberitaan bisnis dan ekonomi.⁸ Bahkan *SKH Bisnis Indonesia* meraih *Silver Winner The Best of news Politic and Business Tabloid* Tahun 2013.⁹

Untuk pemilihan *time frame*, peneliti menganalisis berita *headline SKH Bisnis Indonesia* edisi November 2012. Hal ini karena setiap tanggal 1 November sesuai ketentuan penetapan upah minimum, pemerintah daerah wajib memutuskan jumlah besaran upah minimum di wilayahnya masing-masing atau sesuai instruksi Menakertrans, selambat-lambatnya pada tanggal 20 November atau 40 hari sebelum berlakunya upah minimum, yakni pada tanggal 1 Januari 2013.¹⁰ Sedangkan pemilihan tahun 2012 karena upah minimum tahun 2013 ialah rata-rata kenaikan upah minimum tertinggi dalam sejarah kenaikan upah buruh di Indonesia, yakni sekitar 40 persen. Sedangkan proses penetapan upah minimum 2013 tersebut dilaksanakan pada tahun 2012.¹¹ Adapun sebagai referensi untuk penelitian mengenai upah minimum ini, peneliti menggunakan beberapa

⁸ <http://www.bisnis.com/big-media/profile.html> diakses pada tanggal 3 Oktober 2014

⁹ <http://www.solopos.com/2014/02/08/indonesia-print-media-award-bisnis-indonesia-solopos-harian-jogja-borong-penghargaan-ipma-2014-488113> diakses pada tanggal 3 oktober 2014

¹⁰ Fakta di lapangan tidak semua Gubernur di setiap provinsi menetapkan besaran UMP pada Tanggal 1 November dengan berbagai alasan. Misalnya menunggu ditetapkannya UMP DKI agar Pemerintah Daerah bisa menyesuaikan dengan kenaikan UMP di wilayahnya, karena unjuk rasa buruh, tidak hadirnya salah satu pemangku kepentingan diantara buruh, pengusaha, atau pemerintah dalam rapat sidang keputusan, dan lain sebagainya.

¹¹ Untuk diketahui, dalam pembahasan kenaikan UMP 2014, pemerintah dinilai perlu hati-hati dalam memutuskan kenaikan UMP karena dampak UMP 2013 perusahaan di Indonesia masih terbebani baik biaya upah pekerja sendiri maupun kondisi perekonomian di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pada pertengahan tahun 2013 kondisi perekonomian global mengalami penurunan meski tidak berpengaruh besar pada kondisi perekonomian Indonesia.

penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian skripsi mengenai pelaksanaan upah minimum provinsi DIY bagi pekerja waktu tertentu di PT Anindya Mitra Internasional (perusahaan pemerintah daerah). Dalam penelitian skripsi tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan upah minimum belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan alasan kondisi keuangan perusahaan kurang baik dan gaji pekerja didasarkan pada kualitas/produktivitas kerja. Menariknya, sebagian besar pekerja tidak mengetahui komponen upah minimum. Para pekerja hanya mengetahui bahwa gaji yang mereka terima sudah termasuk gaji pokok, gaji tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Padahal tunjangan tidak tetap tidak dapat disertakan dalam upah yang harus disesuaikan dengan upah minimum.¹²

Kedua, penelitian skripsi mengenai pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang telah memperoleh pengupahan di Yogyakarta. Dalam penelitian ini pengawasan dilakukan oleh pegawai Disnakertans, Purawisata dan Taman Asmukita terhadap perusahaan yang menanggukhan upah minimum. Pengawasan belum dilaksanakan sepenuhnya karena pegawai pengawas melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap keuangan dan kondisi para pekerja hanya di akhir jangka waktu penanggukan, selebihnya memberi suatu pembinaan kepada manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai pengawas di Disnakertrans Kota Yogyakarta hanya berjumlah 8 orang. Kedelapan pegawai pengawas tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap

¹² Krisnawati, Veronika Tyas. 2012. Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY Bagi Pekerja Waktu Tertentu di PT Anindya Mitra Internasional. Universitas Atmajaya Yogyakarta

1422 perusahaan yang terdaftar dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penangguhan upah minimum.¹³

Sedangkan referensi untuk analisis wacana ialah penelitian skripsi oleh Noviana mengenai analisis wacana pemberitaan bencana letusan Gunung Merapi di *SKH Kedaulatan Rakyat* (KR). Dalam analisisnya, pemberitaan bencana *headline SKH KR* kebanyakan berisi proses, kronologi meletusnya Gunung Merapi dan informasi tentang aktivitas Merapi yang semakin meningkat. Bahasa yang digunakan memang tergolong wajar, tetapi jika dianalisis dari struktur bahasanya, ada diksi yang menace pada perendahan martabat manusia. Misalnya kata ‘terpanggang’ yang menerangkan keadaan korban Merapi yang tewas.

Dalam tahap analisis skema wartawan, ia menemukan wartawan KR memahami peristiwa bencana Gunung Merapi. Wartawan KR menambahkan detail pada informasi yang dirasa penting dan kuat, tetapi ada pula maksud yang diungkapkan secara tersamar, misalnya diksi “mengamuk” yang menekankan pada penyebab Merapi mengamuk atau meletus yang ditujukan kepada warga lereng sekitar Merapi yang menjadi penyebab Merapi meletus. Sementara dalam tahap analisis sosial ia menemukan dari berbagai referensi bahwa masyarakat pada umumnya menanggapi berita yang berkembang dari media, baik elektronik maupun cetak.¹⁴

¹³ Triswanto, Yoga. 2007. *Pengawasan Terhadap Perusahaan yang Melaksanakan Penangguhan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal 58.

¹⁴ Dewi Wijayanti, Noviana. 2011. *Media Cetak dan Pemberitaan Bencana Letusan Gunung Merapi: Analisis Wacana Pemberitaan Bencana Letusan Gunung Merapi Pada Headline Surat Kabar Kedaulatan Rakyat periode 27 Oktober 2010 sampai 26 november 2010*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal 134.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana wacana dominan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 yang dibangun di *SKH Bisnis Indonesia* pada edisi November 2012?

C. Tujuan

Untuk mengetahui wacana dominan polemik kenaikan upah minimum tahun 2013 yang dibangun di *SKH Bisnis Indonesia* pada edisi November 2012

D. Manfaat

- Manfaat akademis/ teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi bagi pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam penelitian yang menggunakan analisis wacana kritis model van Dijk yang digunakan peneliti.

- Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang wacana polemik kenaikan upah minimum yang diberitakan di media massa. Selanjutnya, sebagai bahan refleksi dan masukan bagi media massa terhadap pemberitaan atau mewacanakan suatu peristiwa. Terutama dalam wacana kenaikan upah minimum di Indonesia.

E. Kerangka Teori

E.1 Wacana dalam Pandangan Kritis

Kata wacana telah banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan mulai dari bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra dan sebagainya. Masing-masing disiplin ilmu memiliki pengertian, definisi dan batasan-batasan tersendiri mengenai istilah wacana tersebut, namun wacana pada dasarnya berbicara mengenai studi mengenai atau pemakaian bahasa. Setidaknya

ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama berasal dari kaum *positivisme-empiris* yang melihat bahasa sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Dalam pandangan ini analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama yang diukur berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis dan semantik bahasa.¹⁵

Pandangan kedua oleh kaum *konstruktivisme*, disini bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan, justru melihat subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Kaum ini memandang analisis wacana dimaksudkan sebagai analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara.¹⁶

Ketiga, Pandangan kaum kritis yang berfokus pada konstelasi kekuatan atau kuasa yang ada pada masyarakat sehingga berpengaruh pada setiap proses produksi dan reproduksi makna dalam bahasa. Di sini bahasa tidaklah dipahami sebagai medium netral yang berada di luar pembicara tetapi merupakan hasil sebuah representasi yang berperan membentuk subjek, tema atau wacana tertentu. Dalam hal ini wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan,

¹⁵ Eriyanto, op. cit., hal 4.

¹⁶ Eriyanto, op. cit., hal 5-6.

terutama pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian analisis wacana dalam pandangan kritis dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa: batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan.¹⁷ Menurut Fairlough dan Wodak:

Analisis wacana kritis melihat wacana -pemakaian bahasa dalam tutur dan tulisan- sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursus tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu dipresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan.¹⁸

Dalam hal ini, wacana dipandang sebagai sesuatu yang hadir dari proses interaksi atau kegiatan sosial yang terjadi pada masyarakat. Praktik wacana muncul dari praktik kekuasaan yang tidak seimbang di masyarakat. Bahasa dalam hal ini menjadi faktor penting untuk melihat bagaimana ketidak-seimbangan hubungan kekuasaan tersebut terjadi di masyarakat.

Lebih jauh, berikut karakteristik penting dari analisis wacana kritis dari van Dijk, Fairlough, dan Wodak.¹⁹

¹⁷ Eriyanto, op. cit., hal 6.

¹⁸ Eriyanto, op. cit., hal 7.

¹⁹ Eriyanto, op.cit., hal 8.

1. Tindakan

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, bukan sesuatu yang diluar kendali.

2. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana, seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. *Guy Cook* menyebut ada tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana: *teks, konteks dan wacana*. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasan situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Wacana di sini, kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks bersama-sama. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks dalam suatu proses komunikasi.

3. Historis

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, kita melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa menentang Soeharto.

Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis dimana teks itu diciptakan. Bagaimana situasi sosial politik pada saat itu. Oleh karena itu, pada waktu analisis perlu tinjauan mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya.

4. Kekuasaan

Di sini, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang ilmiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Kekuasaan dalam wacana, penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Seseorang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Kontrol di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung tetapi dapat juga berupa kontrol secara mental atau psikis.

Kontrol tersebut juga diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Seseorang yang mempunyai lebih besar kekuasaan bukan hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak tetapi juga bagaimana ia harus ditampilkan.

5. Ideologi

Ideologi juga konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Seperti dikatakan Teun A. van Dijk, ideologi terutama dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota dari suatu kelompok. Ideologi membuat anggota dari suatu

kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok.

Analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama ideologi dari kelompok-kelompok yang ada dalam membentuk wacana. Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah teks tersebut mencerminkan ideologi dari penulisnya seperti feminis, antifeminis, kapitalis, atau sosialis.

E.2 Wacana Dominan

Michael Foucault mengatakan bahwa ciri utama wacana adalah kemampuannya untuk menghimpun suatu wacana yang berfungsi membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat.²⁰ Meski dalam proses sosial masyarakat terdapat berbagai macam topik yang berbeda, kekuasaan yang ada akan lebih memilih dan mendukung wacana tertentu sesuai kepentingan pemegang kekuasaan tersebut. Wacana yang dimunculkan terus menerus perlahan pada akhirnya memuat wacana tersebut menjadi dominan sementara wacana lainnya akan terpinggirkan, dialihkan bahkan sengaja dipendam.

Melalui wacana dominan misalnya, kelompok tertentu memberikan arahan bagaimana suatu objek atau peristiwa dibaca, dipandang dan dipahami sehingga membatasi pandangan yang lebih luas mengenai objek atau peristiwa tersebut.

²⁰ Setiap kekuasaan pada dasarnya berusaha membentuk pengetahuannya sendiri, menciptakan rezim kebenarannya sendiri. Kekuasaan selalu datang dengan memproduksi suatu ekonomi politik kebenaran, melalui mana kekuasaan dengan begitu dimapankan, disusun, dan diwujudkan serta dilestarikan. Lihat Eriyanto, op. cit., hal 76-77.

Bahkan melalui kekuasaan yang ada, kelompok tertentu mampu melestarikan dan memapankan bentuk wacana dominan sesuai keinginan mereka. Hal ini, menurut van Dijk, dikarenakan kelompok dominan lebih mempunyai akses dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan. Kelompok dominan lebih mempunyai akses seperti pengetahuan, uang, pendidikan, dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan.²¹ Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis seperti apa wacana dominan yang disajikan *SKH Bisnis Indonesia*, siapa aktor dominan dan bagaimana ia disajikan dalam mencerminkan realitas polemik kenaikan upah buruh.

E.3 Bahasa pada Media

Kaitan bahasa dengan media menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana bahasa yang digunakan media dalam menyampaikan informasi. Setidaknya penelitian mengenai fungsi bahasa sebenarnya sudah banyak dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Seiring perkembangan zaman makin disadari bahwa bahasa hadir bersamaan dengan sejarah kehidupan sosial masyarakat. Bahasa berada ditengah-tengah aktivitas sosial masyarakat. Bahasa menstruktur pengalaman atau sering disebut sebagai realitas. Pengalaman atau realitas tersebut juga turut membentuk bahasa. Dalam hal ini bahasa,

“...bukan semata-mata sebagai alat komunikasi atau sebuah sistem kode atau nilai yang secara sewenang-wenang menunjuk suatu realitas monolitik. Bahasa adalah suatu kegiatan sosial. Secara sosial ia terikat, dikonstruksikan, dan direkonstruksi dalam kondisi khusus dan *setting* sosial tertentu, ketimbang tertata menurut hukum yang diatur secara ilmiah dan universal.”²²

²¹ Eriyanto, op. cit., hal 12.

²² Di Indonesia praktik pemakaian bahasa sudah dilegimitasi melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui Ejaan Yang Disempurnakan. Namun perlu diketahui legimitasi tersebut merupakan upaya negara, terutama Orde Baru untuk mengatur baik cara pikir, sikap dan

Hal ini berarti bahasa bukanlah medium netral yang berada di sisi luar si pembicara. Sebaliknya, akibat aktivitas maupun peran sosial dalam masyarakat pada akhirnya bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang ada di masyarakat.

Seiring dengan penjelasan di atas, demikian kaum kritis juga selalu mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya, posisi tersebut mempengaruhi berita, bukan pencerminan dari realitas yang sesungguhnya.²³ Pertama, pada posisi wartawan. Wartawan adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial ia berinteraksi dan memiliki peran sosial dalam siklus hubungan sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa wartawan merupakan bagian dari suatu kelas atau kelompok tertentu yang ada dalam masyarakat. Wartawan memiliki nilai-nilai tertentu dalam bagaimana memandang dunia yang pada akhirnya berpengaruh pada bagaimana ia memandang suatu peristiwa dan menuliskannya menjadi berita. Bahkan Eriyanto mengatakan:

Pihak elit dalam media sengaja mengontrol wartawan dan memberi hukuman bagi yang tidak mengikutinya atau tidak menuruti proses-kontrol dan sensor diri- dan imbalan bagi yang patuh dan mengikuti proses. Oleh karena itu, kerja wartawan bukanlah diatur dalam proses dan pembagian kerja, tetapi kontrol kesadaran kelas mereka dalam posisi dengan kelompok elit.²⁴

tindakan masyarakat menuju sistem politik “tertib” atau terkontrol. Lewat bahasa yang digunakannya para petinggi negara bukan hanya menyembunyikan atau menciptakan realitas, tetapi juga bersembunyi dari realitas dan perilakunya yang sesungguhnya. Lihat Latif, Yudi, op. cit., hal 34-35.

²³ Eriyanto, op. cit., hal 32.

²⁴ Proses kontrol dan sensor ini dimaksudkan dengan teknik kerja wartawan yang mengacu pada kenapa ia bekerja seperti ini bukan seperti itu, kenapa ia harus menulis seperti itu, bukan seperti ini, bukanlah karena proses penjaga gerbang, tetapi bagian dari kontrol dan sensor diri. Bentuk sensor ini diwujudkan dalam penghukuman dan imbalan. Lihat Eriyanto, op. cit., hal 42

Selanjutnya, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemakaiannya. Seperti dikatakan Tony Bennet, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai kepentingannya.²⁵ Dalam hal ini, bagaimana realitas atau peristiwa dijadikan berita sebenarnya dipengaruhi oleh ideologi ataupun kepentingan kelompok yang ada dalam masyarakat ataupun media itu sendiri.

Dalam masyarakat misalnya, konflik hubungan industrial antara pengusaha dan buruh. Pengusaha akan lebih mudah mengakses media ataupun mengadakan konferensi pers dibandingkan buruh dalam menyatakan pandangannya mengenai konflik hubungan industrial tersebut. Hal ini dikarenakan pengusaha memiliki biaya ataupun kekuasaan dibandingkan buruh. Akhirnya, berpengaruh pada bagaimana media memberitakan konflik tersebut. Demikian halnya media, pengiklan, pemilik media yang juga pengusaha ataupun politikus juga dapat mempengaruhi isi berita.

Dengan demikian, bahasa yang digunakan media sebenarnya dapat menciptakan realitas tertentu kepada khalayak. Berita, melalui kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu tetapi juga membatasi persepsi kita dan mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan tertentu.²⁶

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa berbagai peristiwa yang telah disajikan oleh media/surat kabar merupakan realitas yang telah dikonstruksikan.

²⁵ Eriyanto, op. cit., hal 36.

²⁶ Badara, Adris. 2012. Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media. Jakarta: Kencana Media Group. Hal 57.

Seluruh berita yang disajikan dan yang kita baca setiap hari merupakan pembentukan realitas oleh media. Lebih jauh,

Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa. Lewat bahasa, lewat pemberitaan media dapat membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu yang pada akhirnya menentukan bagaimana khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dalam kaca mata tertentu.²⁷

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana praktik pemakaian bahasa yang digunakan *SKH Bisnis Indonesia* dalam mencerminkan realitas mengenai polemik kenaikan upah buruh menjadi sebuah berita yang utuh.

F. Metodologi Penelitian

F.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis wacana polemik kenaikan upah minimum. Began dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.²⁹

Oleh karena itu, data penelitian baik berupa teks, hasil wawancara, kajian referensi dan literatur yang direlevan akan dipahami dan dianalisis sedalam-

²⁷ Eriyanto, op. cit., hal 24.

²⁸ Lexy J. Meleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 3.

²⁹ Kriyanto, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta; Kencana. Hal 56-67.

dalamnya sebagai satu kesatuan unit analisis atau holistik dengan tujuan untuk mencapai pemaknaan atas wacana yang dibangun, ditampilkan *SKH Bisnis Indonesia*.

F.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah berita *headline SKH Bisnis Indonesia* edisi November 2012 yang menyajikan berita polemik kenaikan upah minimum.

F.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Data primer,

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung peneliti dari sajian berita *headline* di *SKH Bisnis Indonesia*. Hal ini *headline* atau berita utama adalah informasi atau berita yang dianggap penting dari seluruh informasi yang disajikan suatu koran. Berita utama atau *headline* juga dianggap sebagai berita paling aktual pada hari terbit, sehingga ditempatkan pada halaman depan di sudut kiri atau kanan atas.³⁰ Dengan demikian dengan menyajikan berita polemik upah minimum menjadi *headline* atau berita utama maka penting bagi *SKH Bisnis Indonesia* untuk menginformasikan kepada pembacanya.

Untuk melihat bagaimana gambaran umum polemik kenaikan upah minimum, peneliti mendokumentasikan seluruh berita yang disajikan oleh *SKH Bisnis Indonesia* selama penetapan peraturan hingga dampak upah minimum tersebut, yakni pada bulan Mei 2012 hingga april 2013. Selama periode waktu

³⁰ Mallarangeng, Rizal. 2010. Orde Baru: Tinjauan isi Kompas dan Suara Karya. Gramedia: Jakarta. Hal 33

tersebut, berita yang disajikan oleh *SKH Bisnis Indonesia* terkait polemik kenaikan upah minimum 2013 berjumlah 40 berita. Berdasarkan judul, pemberitaan mengenai sistem pengupahan berjumlah 4 berita, usulan besaran dan penetapan upah 7 berita, dampak negatif polemik kenaikan upah minimum dan aksi unjuk rasa buruh 7 berita, dampak positif kenaikan upah minimum 3 berita, aksi unjuk buruh 5 berita, penangguhan upah minimum 7 berita, kritik terhadap pemerintah 2 berita, penundaan UMP 3 berita, dan keberatan kenaikan upah minimum berjumlah 3 berita. Dari 40 berita terdapat 7 berita *headline*, yang peneliti dijadikan sebagai teks yang akan dianalisis yakni;

- Rabu, 7 November 2012, Gejolak Buruh Ganggu Investasi
- Jumat, 9 November 2012, Upah buruh diusulkan Rp 2 juta
- Sabtu, 10 November 2012, SBY Instruksikan Solusi Win-win
- Kamis, 22 November 2012, Pengusaha Pasrah
- Jumat, 23 November 2012, Buruh Beraksi, Pasar Berspekulasi
- Sabtu, 24 November 2012, UKM Bisa Penangguhan UMP
- Rabu, 28 November 2012, Pemerintah Terkesan Lepas tangan

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada wartawan maupun redaksi *SKH Bisnis Indonesia* yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari kajian pustaka seperti buku-buku ataupun kumpulan artikel yang berkaitan dengan sejarah upah minimum, situasi perekonomian Indonesia serta data media *SKH*

Bisnis Indonesia yang digunakan untuk data ataupun analisis penelitian yang berkaitan dengan wacana polemik kenaikan upah minimum tahun 2013.

F.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis wacana kritis model Teun van Dijk. Peneliti menggunakan buku “Analisis wacana” karangan Eriyanto sebagai referensi utama.

F.4.1 Analisis Wacana Kritis Model Teun van Dijk

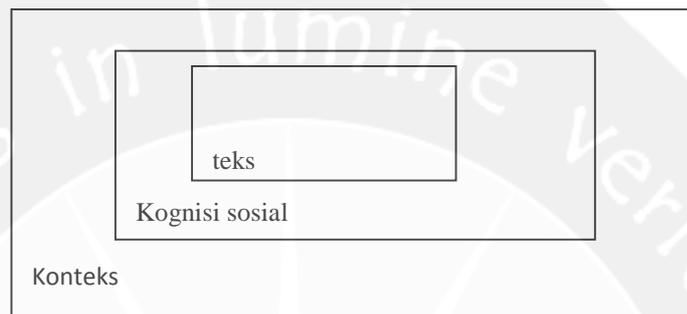
Model analisis van Dijk sering disebut sebagai kognisi sosial. Hal ini dikarenakan van Dijk tidak mengeksklusikan modelnya dengan menganalisis teks semata. Ia juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu.³¹ Artinya bahwa berita yang disajikan media merupakan hasil dari suatu praktik produksi yang dipengaruhi oleh kognisi sosial wartawan dan praktik kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Suatu teks yang cenderung memarginalkan posisi perempuan, misalnya, lahir karena kognisi/kesadaran mental di antara wartawan bahkan kesadaran dari masyarakat yang memandang perempuan secara rendah. Dalam hal ini, teks hadir dan bagian dari representasi yang menggambarkan masyarakat yang patrikal. Sedangkan media membentuk konsesus dan pembenar bahwa seperti itulah kenyataannya.³²

³¹ Eriyanto, op. cit., hal 224.

³² Media dipandang memiliki peran penting dalam membentuk, memproduksi dan mereproduksi suatu wacana. Sebagian besar informasi kelompok minoritas mengenai kelompok lain berasal dari media. Bila tidak ada sumber-sumber alternatif mengenai suatu masalah, maka media menjadi

Untuk membongkar bagaimana wacana pada teks media, van Dijk membagi tiga dimensi atau bangunan yang digabungkan menjadi satu unit analisis yang utuh, yakni analisis pada level teks, level kognisi sosial dan level konteks sosial.



Gambar 1.1 : Dimensi analisis wacana Teun A.van Dijk³³

F.4.1.1 Level Teks

Pada level teks, van Dijk melihat teks terdiri atas tiga struktur atau tingkatan yang saling mendukung. Pertama, struktur makro yang merupakan struktur makna global atau umum teks untuk melihat topik atau tema suatu berita. Kedua, superstruktur. Hal ini berhubungan dengan kerangka suatu teks, misalnya bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan suatu berita. Ketiga, bagian kecil dari teks berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.

Menurut van Dijk ketiga elemen di atas membentuk suatu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Ketiga elemen tersebut merupakan unit analisis untuk melihat tema, susunan alur cerita dan pilihan kata, kalimat, proposisi dan

sumber bagi opini publik mengenai masalah tersebut. tidak jarang orang berkata: “ini benar, aku membacanya di surat kabar kemarin.” Lewat media, bukan hanya informasi mengenai kelompok lain disediakan. Tetapi juga terjadi konsensus. Media memberi polarisasi pada kelompok dengan cara memusatkan perhatian pada diri kita dan mereka. Lihat Eriyanto, op. cit., hal 221-224.

³³ Eriyanto, op. cit., hal 225.

lain sebagainya dimuat menjadi sebuah teks atau berita. Dari situ kemudian akan dapat dilihat bagaimana media mengungkapkan suatu peristiwa tertentu lewat pilihan bahasa atau retorika yang digunakan kepada khalayak pembaca. Berikut akan diuraikan satu persatu elemen van Dijk tersebut.³⁴

a. Tematik

Elemen ini berkaitan dengan inti, ringkasan, topik, tema yang ingin diungkapkan wartawan dalam pemberitaannya. Inti, ringkasan, topik, atau tema ini misalnya dapat kita ketahui setelah membaca keseluruhan berita. Dengan demikian dapat dilihat gagasan atau inti apa yang dikedepankan wartawan saat memandang peristiwa. Apakah berita tersebut menunjukkan dominasi, kekuasaan, atau memarjinalkan kelompok lain.

b. Skematik

Skematik berkaitan dengan bagaimana alur atau urutan berita yang disampaikan wartawan. Menurut van Dijk, arti penting skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting.³⁵ Upaya penyembunyian informasi atau peristiwa penting biasanya dilakukan dengan menempatkan informasi atau peristiwa tersebut dibagian akhir berita.

Dua kategori yang biasanya untuk melihat strategi skematik ini ditandai dengan skema besar. Pertama, *summary* yang umumnya ditandai dengan dengan

³⁴ Eriyanto, op. cit., hal 228.

³⁵ Eriyanto, op. cit., hal 234.

dua elemen yakni judul dan *lead*. Judul dan *lead* umumnya menunjukkan tema yang ingin ditampilkan wartawan. *Lead* biasanya digunakan sebagai pengantar ringkasan sebelum masuk ke dalam isi berita. Kedua, *story* berupa isi berita secara keseluruhan. *Story* memiliki dua subkategori yakni peristiwa yang berkaitan dengan proses berjalannya suatu peristiwa dan reaksi verbal berupa komentar yang ingin ditampilkan pada teks berita.

c. Semantik

Hal ini berkaitan dengan makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Semantik ini terdiri dari latar, detil, maskud dan praanggapan. Berikut uraiannya akan dijelaskan satu persatu:³⁶

- Latar

Hal ini berkaitan dengan latar apa yang dipilih dan kearah mana pandangan khalayak hendak dibawa dalam berita. Kadang maksud atau isi utama tidak dibeberkan dalam teks, tetapi dengan melihat latar apa yang ditampilkan dan bagaimana latar tersebut disajikan, kita bisa menganalisis apa maksud yang tersembunyi yang ingin dikemukakan oleh wartawan sesungguhnya.³⁷

Misalnya, bagi yang setuju pada demonstrasi buruh, latar yang dipakai ialah keberhasilan berbagai gerakan buruh dalam melakukan perubahan. Sebaliknya, yang tidak setuju akan memakai latar berbagai dampak negatif akibat demonstrasi buruh.

³⁶ Eriyanto, op. cit., hal 235.

³⁷ Eriyanto, op. cit., hal 235.

- **Detil**

Elemen ini berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Misalnya, hal yang menguntungkan komunikator atau pembuat teks akan diuraikan secara detil dan terperinci, sebaliknya fakta yang tidak menguntungkan, detil informasi akan dikurangi.³⁸

Dalam demonstrasi buruh tersebut misalnya, peristiwa demonstrasi diuraikan secara detil bagaimana buruh mengumpulkan massa, memadati sepanjang jalan lokasi pabrik, mendekati dan melempari pabrik, merusak peralatan pabrik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemahaman pembaca akan tampak semakin buruk terhadap citra demonstrasi buruh.

- **Maksud**

Dalam konteks media, elemen maksudnya menunjukkan bagaimana informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eskplisit dan jelas. Misalnya sikap penolakan pengusaha terhadap kenaikan upah, misalnya disajikan secara jelas bagaimana dampak analisis kenaikan upah ini seperti kenaikan biaya produksi perusahaan, rasionalisasi pekerja, menutup relokasi pabrik, inflasi tinggi, jumlah pengangguran dengan lapangan kerja yang timpang yang biasanya tidak mendukung kenaikan upah, aksi unjuk rasa yang mengganggu aktivitas warga bahkan menutup pabrik yang berakibat pada kerugian perusahaan dan lain sebagainya.

³⁸ Eriyanto, *op. cit.*, hal 238.

- **Praanggapan**

Elemen ini berkaitan dengan pernyataan yang digunakan untuk mendukung suatu teks. Praanggapan ini hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan.³⁹ Praanggapan ini padahal bisa saja berupa tafsiran oleh wartawan atau media dari pernyataan seseorang. Dengan demikian praanggapan tersebut bisa saja belum tentu kebenaran atau fakta sebenarnya

Misalnya, seseorang yang setuju dengan demonstrasi mahasiswa akan memakai praanggapan berupa “ perjuangan mahasiswa menyuarkan hati nurani rakyat”. Pernyataan ini adalah suatu premis dasar yang akan menentukan posisi dukungannya terhadap gerakan mahasiswa pada kalimat berikutnya. Setelah pernyataan itu, umumnya akan diikuti oleh pernyataan yang isinya mendukung gerakan mahasiswa. Pernyataan itu mengandaikan bahwa perjuangan mahasiswa itu murni, tidak dipengaruhi oleh motif politik. sehingga setiap demonstrasi mahasiswa harus didukung karena menyuarkan suara rakyat.⁴⁰

d. Sintaksis

Elemen ini yang berfungsi untuk meneliti bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih. Sintaksis dapat dibagi menjadi subkategori, diantaranya:

- **Bentuk Kalimat**

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Di mana ia menanyakan apakah A yang menjelaskan B, ataukah B yang menjelaskan A. Logika kausalitas ini kalau

³⁹ Eriyanto, op. cit., hal 256.

⁴⁰ Eriyanto, op. cit., hal 256.

diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang diterangkan).⁴¹ Dalam hal ini pada susunan kalimat yang dituliskan wartawan bisa menentukan posisi seseorang terhadap suatu peristiwa, apakah ia menjadi subjek atau obyek pemberitaan.

Misalnya, dalam kalimat “polisi menembak buruh” menempatkan polisi sebagai subjek. Dengan penempatan posisi awal di kalimat, memberi glorifikasi atas kesalahan polisi. Sebaliknya kalimat “buruh ditembak polisi”, polisi ditempatkan secara sembunyi. Makna yang muncul dari susunana kalimat ini berbeda, karena posisi sentral dalam kedua kalimat ini adalah buruh.

- **Koherensi**

Koherensi berkaitan dengan kata penghubung yang digunakan wartawan dalam menulis berita untuk menjelaskan suatu peristiwa. Pilihan-pilihan terhadap kata penghubung yang dipakai atau digunakan ditentukan oleh sejauh mana kepentingan yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalnya, penghubung tertentu peristiwa yang berbeda dapat digabungkan sehingga tampak koheren atau mendukung suatu peristiwa.

Sebagai contoh, proposisi “demonstrasi buruh” dan nilai tukar rupiah melemah” adalah dua fakta yang berlainan. Ketika disajikan menjadi “demonstrasi buruh yang berlangsung dalam sepekan menyebabkan nilai tukar melemah” dapat menjadi suatu peristiwa mendukung, yakni nilai tukar rupiah melemah akibat demonstrasi buruh.

⁴¹ Eriyanto, op. cit., hal 251

- **Kata Ganti**

Elemen kata ganti ini sering digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Misalnya, penggunaan kata “saya” atau “kami” yang menggambarkan sikap seseorang atau komunitas. Dengan menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator juga menjadi sikap komunitas secara keseluruhan.⁴² Hal ini akan mempengaruhi pembaca bagaimana ia memandang komunitas tersebut. Padahal sikap komunikator tersebut belum tentu dapat mewakili sikap komunitas tersebut secara keseluruhan.

- **Pengingkaran**

Elemen ini berkaitan dengan menunjukkan seolah-olah wartawan setuju terhadap suatu pernyataan atau peristiwa tertentu, padahal yang ia inginkan ialah sebaliknya. Dengan demikian ketidak-setujuannya tersebut ditandai dengan memberi argumentasi atau fakta yang bertentangan atau menyangkal pernyataan sebelumnya.

e. **Stilistik**

Merupakan kategori bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks dalam berita. Indikatornya, ialah leksikon.⁴³ Pada dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atau label atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.⁴⁴ Misalnya pemilihan kata “pekerjaan domestik” dipakai dalam pembagian kerja pada suatu artikel dapat menunjukkan sikap, ideologi, atau sistem sosial patriaki yang ada di masyarakat.

⁴² Eriyanto, op. cit., hal 253-254.

⁴³ Eriyanto, op. cit., hal 229.

⁴⁴ Eriyanto, op cit., hal 255.

f. Retoris

Berhubungan dengan bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan. Penekanan ini dapat dilihat dari penyajian grafis atau metafora.⁴⁵

- Grafis

Elemen ini merupakan bagian untuk menekankan atau menonjolkan apa yang dianggap penting dari suatu teks. Bagian-bagian yang ditonjolkan ini menekankan bagian yang penting dan berusaha untuk menarik perhatian pembacanya. Misalnya melalui penggunaan tabel, *caption*, pemakaian huruf tebal, huruf miring, dan lain sebagainya.

Pemakaian angka-angka dalam berita misalnya digunakan untuk mensugesti kebenaran, ketelitian dan posisi dari suatu laporan. Pemakaian jumlah, ukuran-ukuran statistik menurut van Dijk, bukan semata bagian standar jurnalistik tetapi juga mensugesti presisi dari apa yang hendak dikatakan dalam teks.⁴⁶

Dalam demonstrasi buruh misalnya dipaparkan jumlah buruh yang mengalami luka-luka bukan hanya bagian dari standar jurnalistik, tetapi ada upaya strategi dari wartawan untuk menyakinkan bahwa peristiwa demonstrasi yang berlangsung anarkis, ricuh dan brutal adalah benar adanya, faktual dan didukung oleh fakta-fakta.

- Metafora

Dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang digunakan sebagai

⁴⁵ Eriyanto, op. cit., hal 229.

⁴⁶ Eriyanto, op. cit., hal 258.

ornamen atau bumbu dari suatu berita.⁴⁷ Hal yang harus diperhatikan ialah bagaimana metafora yang digunakan wartawan dalam memperkuat makna yang ingin disampaikan sehingga mempengaruhi sikap pembacanya. Bahkan untuk memperkuat isi pesan tak jarang misalnya wartawan mengambil dari kata-kata kuno, kata-kata bijak dari tokoh terkemuka, pepatah, peribahasa dan pesan-pesan ayat suci.

F.4.2 Pada Level Kognisi Sosial

Pada level kognisi sosial van Dijk mengkaji mengenai proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan. Menurutnya, penting untuk meneliti bagaimana kondisi kesadaran mental seorang wartawan dalam menuliskan sebuah berita. Artinya, perlu untuk melihat bagaimana pengetahuan, kepercayaan atau prasangka wartawan dalam memandang suatu peristiwa dalam menuliskan sebuah peristiwa menjadi sebuah berita. Hal ini bertujuan agar kita dapat lebih mudah membongkar makna atau pesan tersembunyi dari berita yang ia tuliskan. Hal tersebut karena:

Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa.⁴⁸

Di sini pemakai bahasa adalah wartawan. Wartawanlah yang memberikan makna pada suatu kata-kata tertentu atau pada berita terhadap suatu peristiwa yang diliputnya. Meski akhirnya bagaimana berita yang disajikan media berada di tangan *editor* atau redaktur, tetapi tetap saja, wartawanlah yang pertama kali

⁴⁷ Eriyanto, op. cit., hal 259.

⁴⁸ Eriyanto, op. cit., hal 260.

berhadapan dengan sebuah peristiwa, memaknai peristiwa tersebut hingga ditulis menjadi sebuah berita.

Van Dijk membagi beberapa elemen untuk mengkaji kognisi wartawan dalam proses produksi berita, yaitu pertama, skema atau model yang berkaitan kerangka berpikir individu dalam memandang dan memahami suatu peristiwa dipengaruhi oleh pandangannya terhadap manusia, peran sosial dan peristiwa. Dalam hal ini, model atau skema bersifat personal dan subjektif yang menampilkan bagaimana individu melihat, menafsirkan, dan mengkonstruksikan suatu peristiwa. Kedua, memori yang dipakai untuk menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan ingatan yang diperoleh dari berbagai pengalaman ataupun pengetahuan.

Ketiga seleksi, berkaitan dengan strategi yang kompleks yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa, informasi diseleksi wartawan untuk ditampilkan ke dalam berita. kedua, reproduksi yang berhubungan dengan apakah informasi dikopikan, digandakan atau tidak dipakai sama sekali. Selanjutnya, penyimpulan berkaitan dengan bagaimana realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan ringkas. Kelima, transformasi lokal yang berkaitan dengan bagaimana peristiwa yang kompleks akan ditampilkan dalam struktur teks.⁴⁹ Dengan demikian ketika melihat peristiwa, wartawan menggunakan model atau skema tertentu dalam pemahaman peristiwa tersebut kemudian ia menyeleksi, menyimpulkan, dan menyajikan berbagai peristiwa yang ia lihat, pahami, dan dituliskan menjadi sebuah berita.

⁴⁹ Eriyanto, op. cit ., hal 268-270

F.4.3 Level Analisis Sosial

Pada level analisis sosial, menurut van Dijk, wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Hal ini untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan diproduksi lewat praktik diskursus dan legimitasi.⁵⁰ Dengan demikian kita dapat melihat bagaimana sejauhmana pemaknaan suatu hal dianggap benar, sah, dan sewajarnya baik di media dan masyarakat lewat praktik wacana dan kekuasaan yang ada.

Misalnya mengapa pemberitaan mengenai demonstrasi buruh selalu dicitrakan buruk. Untuk memahami lebih jauh mengenai hal ini kita harus melihat bisa saja sistem pasar yang dianut suatu negara dan masyarakat ialah sistem kapitalis yang mengutamakan keuntungan maksimal sehingga demonstrasi berdampak pada kerugian perusahaan, masyarakat dan negara. Dengan demikian demonstrasi dilegimitasi menjadi suatu tindakan yang buruk dan harus dihindari agar tidak mengganggu situasi kondusif negara atau masyarakat.

Dalam analisis mengenai masyarakat ini, van Dijk membagi dua poin yang penting untuk melihat bagaimana wacana berkembang di masyarakat, yakni:

a. Praktik Kekuasaan

Van dijk mendefenisikan kekuasaan tersebut sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya), satu kelompok untuk mengontrol

⁵⁰ Eriyanto, op. cit., hal 271.

kelompok (atau anggota) dari kelompok lain.⁵¹ Kekuasaan ini dapat bersifat fisik seperti uang, status pengetahuan ataupun berbentuk persuasif yang dapat mengontrol tingkah laku, pikiran, cara pandang, sikap, pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, lewat kekuasaan yang dimilikinya suatu kelompok mampu mendominasi kelompok lain.

Misalnya, dalam zaman orde baru, lewat kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Soeharto ia mampu mengontrol berbagai bidang tingkat kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan visi misi pembangunan yang diembannya, seperti penggunaan Keluarga Berencana (KB) guna mengontrol angka kelahiran masyarakat atau lewat program normalisasi kehidupan kampus (NKK) agar mahasiswa tidak ikut terlibat lagi secara langsung dalam kegiatan politik.

b. Akses Mempengaruhi wacana

Menurut van Dijk, mereka yang lebih berkuasa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada media, dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak. Akses yang lebih besar bukan hanya memberi kesempatan untuk mengontrol kesadaran khalayak lebih besar, tetapi juga menentukan topik apa dan isi wacana apa yang dapat disebarkan dan didiskusikan kepada khalayak.⁵²

Dalam hal ini, masyarakat yang tidak memiliki akses selain sebagai konsumen juga telah diatur untuk memperluas topik dan isi wacana lewat di lingkungan sosialnya. Misalnya, dalam masa orde baru, lewat kekuasaan dan akses yang dimilikinya, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menonton

⁵¹ Eriyanto, op. cit., hal 272.

⁵² Eriyanto, op. cit., hal 274-275.

film dokumenter *G30/SPKI* setiap tanggal 30 September di sekolah, layar tancap ataupun bioskop-bioskop sehingga secara tidak langsung masyarakat menganggap Partai Komunis adalah musuh negara.

F.4.4 Kerangka Analisis

Berikut kerangka analisis van Dijk untuk menganalisis wacana polemik kenaikan upah minimum:

STRUKTUR	METODE
Teks Menganalisis bagaimana strategi wacana dominan yang dipakai untuk menggambarkan polemik upah minimum terutama pada November 2012	<i>Critical linguistic</i> Analisis stuktur teks melalui berita <i>headline</i> edisi November <i>SKH Bisnis Indonesia</i>
Kognisi Sosial Menganalisis bagaimana kognisi wartawan dalam memahami polemik upah minimum yang akan ditulis/diberitakan	Wawancara mendalam Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai jajaran redaksi <i>SKH Bisnis Indonesia</i> yang terikat/terlibat dalam pemberitaan polemik kenaikan upah minimum
Analisis sosial Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai polemik kenaikan upah minimum	Studi pustaka melalui buku, situs website, artikel, surat pembaca, opini, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan polemik kenaikan upah minimum.